

BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Reklamasi

Edisi : 15 April 2009
Halaman : 26

Reklamasi Mulai 2009 Jakarta Utara Perlu Banyak Pembenahan

Jakarta, Kompas - Reklamasi di pantai utara Jakarta dapat dimulai tahun ini. Selain untuk memperluas lahan komersial di Jakarta Utara, reklamasi juga dilakukan untuk menahan banjir akibat kenaikan permukaan air laut. Reklamasi juga harus diikuti penataan Jakarta Utara.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriadmoko, Selasa (14/4) di Jakarta Pusat, mengatakan, reklamasi tahap pertama dapat dilakukan oleh pengembang PT Kapuk Naga Indah (KNI), yang juga pengembang Pantai Indah Kapuk. PT KNI tinggal menyelesaikan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Begitu studi amdal selesai, pembangunan reklamasi akan segera dilakukan tahun ini. Reklamasi akan dilakukan untuk menciptakan lahan baru seluas 674 hektar," kata Wiriadmoko saat membuka Seminar Awal Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pantura Jakarta.

Proses reklamasi pantura Jakarta, kata Wiriadmoko, akan menggunakan sebagian material hasil pengerukan 13 sungai utama di Jakarta. Pengerukan yang didanai pinjaman lunak Bank Dunia itu akan dilakukan pada Juli mendatang.

Hasil reklamasi di pantura Jakarta, kata Wiriadmoko, akan berbentuk pulau tersendiri yang terpisah dari daratan dan dihubungkan dengan jembatan. Di sekeliling pulau baru itu akan dibangun tanggul setinggi 8 meter untuk menahan banjir akibat kenaikan permukaan laut.

Menurut Wiriadmoko, pada 2050 kenaikan permukaan air laut diperkirakan mencapai 4 meter. Dengan kenaikan itu, Taman Monas yang memiliki ketinggian 3 meter di atas permukaan laut bakal tenggelam.

Hasil reklamasi di pantura Jakarta akan berfungsi seperti Marina Barrier di Singapura atau tanggul laut di Amsterdam, Belanda. Di sisi lain, laut di antara daratan Jakarta dan pulau hasil reklamasi akan menjadi semacam kolam penampung air dan dilengkapi sistem polder.

"Reklamasi mutlak diperlukan untuk mencegah tenggelamnya sebagai wilayah Jakarta. Sistem polder yang dibangun akan membantu mengurangi risiko banjir," kata Wiriadmoko.

Sampai saat ini terdapat tujuh perusahaan yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mereklamasi pantura Jakarta. Selain PT KNI, terdapat PT Jaladri Kartika Eka Paksi yang akan mereklamasi 200 hektar, PT Pembangunan Jaya Ancol 340 hektar, 82 hektar, dan 20 hektar di tiga lokasi berbeda, PT Manggala Krida Yudha 375 hektar, PT Pelindo II 125 hektar, PT Dwi Marunda Makmur 220 hektar, dan PT Jakarta Propertindo 290 hektar.

Hak publik

Tanggul di sekeliling pulau hasil reklamasi akan memiliki lebar sekitar 100 meter. Tanggul itu akan dijadikan kawasan penghijauan dan taman publik.

Masyarakat umum dapat mengakses taman publik itu secara gratis. Hak masyarakat untuk menikmati pantai secara gratis tidak boleh dibatasi oleh pengembang. Jika pengembang membatasi akses masyarakat, Pemprov akan mencabut izin perusahaan itu.

Di tanah hasil reklamasi, kata Wiriadmoko, juga akan disediakan lahan bagi permukiman nelayan. Permukiman akan diatur agar rapi dan tidak kumuh.

Selain reklamasi, Jakarta Utara akan ditata ulang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030. Kawasan-kawasan kumuh akan diperbaiki dan semua prasarana transportasi barang dan orang akan direvitalisasi.

"Jakarta Utara akan didesain menjadi pusat aktivitas ekonomi kembali sehingga semua jaringan dan fasilitas transportasi harus dioptimalkan. Di Jakarta Utara terdapat jalan arteri, jalur kereta api, stasiun, terminal, dan belasan pelabuhan yang harus diperbaiki agar berfungsi optimal," kata Wiriadmoko. (ECA)